

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Penilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja sebagai Acuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hambatan lain terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multi dimensi. Sebagian pakar berpendapat bahwa akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bukan merupakan indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam peraturan diatas, pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja).

Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan *good governance* dalam mengelola urusan-urusan publik. Sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya *management strategy* yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui

implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi, dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabilitas, partisipatif dan responsive dilengkapi dengan Analisis Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja dalam upaya menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya ini dimaksudkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh

Jaya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

Ada pun tujuannya adalah :

- a. memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun Anggaran 2015;
- b. sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya di masa yang akan datang;
- c. untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya sehingga tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Aceh Jaya

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

b. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah .
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Inovasi Daerah

Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya membuat terobosan program/kegiatan pelayanan melalui bidang Koperasi dan UKM yaitu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Gerbang Raja Kabupaten Aceh Jaya, produk-produk yang ditawarkan/sudah dilayani adalah produk *mudharabah* dan *murabahah* dengan menganut pola syariah atau berbagi hasil, pelayanan dan pembiayaan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Gerbang Raja Kabupaten Aceh Jaya bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan usaha kecil menengah pada sektor-sektor yang memiliki potensi usaha produktif, pembiayaan pola syariah tersebut diharapkan mampu membangkitkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pengembangan usaha kecil, usaha dagang, industri rumah tangga dan usaha produktif lainnya.

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2010. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari;
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
2. Bidang Perindustrian, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha Perindustrian
 - 2) Seksi Registrasi dan Pengendalian Mutu
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Pasar
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Perlindungan Konsumen, dan Metrologi.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

4. Aparatur

Sumber Daya Manusia (aparatur penyelenggaraan) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 sebanyak 32 orang, jumlah pegawai dan honorer, klasifikasi golongan, eselonering dan kualifikasi pendidikan dapat diuraikan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai dan T. Kontrak/Honorer

No.	Nama SKPD	Jumlah Pegawai dan T. Kontrak/ Honorer		
		PNS	T.Kontrak/ Honorer	Jumlah
1.	Disperindagkop dan UKM	21	11	32

Tabel 1.2
Klasifikasi Golongan, Eselonering dan Pendidikan

Klasifikasi Golongan				Jumlah Eselonering					Kualifikasi Pendidikan				
I	II	III	IV	I	II.b	III.a	III.b	IV.a	SMP	SMU	D3	S1	S2
-	5	12	5		1	1	3	9	1	9	6	12	4

Berdasarkan Tabel 1.1 dan 1.2 bahwa jumlah Pegawai Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang dan 11 orang Tenaga Kontrak/Honorer. Klasifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 12 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Bila dilihat dari kualifikasi pendidikan, PNS yang sudah menyandang gelar Magister (S2) sebanyak 4 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 dan Sarjana Muda (D III) sebanyak 5 orang, sementara jumlah eselonering II.b sebanyak 1 orang, eselonering III.a sebanyak 1 orang, eselonering III.b sebanyak 3 orang dan eselonering IV.a sebanyak 9 orang.

D. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan.

- Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga dalam turut memikirkan kemajuan sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru, baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya .

2. Strategi integrasi kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai eksekusi negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

3. Strategi penguatan kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

Analisis lingkungan internal dan eksternal pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diperoleh isu-isu strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan dalam memanfaatkan peluang potensi daerah dan menjalin kemitraan dengan BUMN/Swasta.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah masih rendah.
3. Mendorong jumlah UMKM sebagai pelaku ekonomi rakyat
4. Mendorong jumlah investor dalam mengembangkan sektor industri, perdagangan dan UMKM.
5. Mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dapat mendorong perekonomian sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah belum tergali, diolah dan dimanfaatkan secara kreatif.
6. Meningkatkan daya saing produk untuk menembus pasar regional dan global.
7. Mendorong usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan profesionalisme pengusaha/pengrajin dalam mengelola usahanya.
9. Meningkatkan kualitas koperasi sebagai badan usaha untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
10. Melengkapi sarana dan prasarana pembinaan kepada usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bagi pelaku industri sehingga mampu bersaing dengan IKM dari luar daerah.
12. Menjalinkan kemitraan dengan pengusaha dari luar daerah terutama pengusaha/pemilik pasar modern.
13. Menumbuhkan jaringan usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan untuk memenuhi permintaan pasar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Sistematika penyajiannya sebagai berikut :

- BAB I - PENDAHULUAN
- BAB II - PERENCANAAN KINERJA
- BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Tahun 2015

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015
2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

C. Realisasi Anggaran Tahun 2015

- BAB IV - PENUTUP
- Lampiran - Lampiran